

Representasi Tubuh Perempuan Disabilitas

Oleh Mukhotib MD

Meski, perempuan disabilitas memiliki kebutuhan mendefinisikan diri mereka sendiri, tetap saja mereka berada di pinggiran dari gerakan keadilan sosial, bahkan dari gerakan yang mengatasnamakan diri mereka—gerakan perempuan, gerakan hak-hak orang dengan disabilitas, dan gerakan hak-hak sipil—meninggalkan perempuan dan anak perempuan disabilitas dari semua latar belakang yang tak terlihat secara esensial.”

(Rosemarie Garland-Thomson dan Barbara Faye Waxman Fiduccia)

Kutipan di atas menunjukkan dengan gamblang, posisi perempuan dengan disabilitas dalam peta gerakan sosial dan gerakan perempuan. Secara terang benderang melahirkan kesadaran baru: tak tepat benar sekiranya melakukan pengarusutamaan gender dalam kerangka kerja analisis teori feminis tanpa disabilitas, yang mendasarkan gerakan dan kerangka analisisnya pada ketertindasan perempuan tanpa disabilitas.

Pemikiran ini mengantarkan pada kesadaran kritis dan empiris, ketertindasan sosial perempuan tanpa disabilitas memang berbeda dengan pengalaman ketertindasan perempuan dengan disabilitas. Dengan kata lain, perempuan dengan disabilitas memiliki pengalaman ketertindasannya sendiri, lebih kompleks dan berlapis ketimbang pengalaman ketertindasan perempuan tanpa disabilitas.

Ketertindasan perempuan dengan disabilitas terjadi karena ide-ide budaya mengenai tubuh, ragam ketubuhan, dan abnormalitas dalam kehidupan sosial. Pandangan ini membawa pemahaman mendalam dan meyakinkan, ketertindasan perempuan dengan disabilitas memang berbasis pada tubuhnya.

Perbedaan pengalaman ketertindasan, menjadikan ranah gerakan ideologis pun menjadi berbeda. Kritik ideologis para feminis tanpa disabilitas diarahkan pada peran

tradisional gender yang dibakukan secara budaya terhadap perempuan, dan melahirkan diskriminasi dan halangan pada wilayah publik, termasuk politik dan ekonomi.

Bagi feminis dengan disabilitas, kritik ideologis diarahkan pada pelabelan tubuh yang dianggap abnormal, tidak sesuai penggambaran sosial mengenai tubuh, politik penampilan, medikalisasi tubuh. Nilai-nilai ini melahirkan berbagai diskriminasi tidak saja peran publiknya, melainkan juga halangan-halangan dalam peran domestiknya.

Feminis tanpa disabilitas menolak keras diskriminasi akibat pelabelan peran domestik—merawat rumah tangga, mengasuh anak—yang dibakukan sebagai kewajiban perempuan, sebab laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama.

Tidak demikian bagi perempuan dengan disabilitas. Mereka memperjuangkan haknya pada wilayah domestik, sebab secara sosial dan budaya diragukan bisa menjadi ibu—merawat rumah tangga dan membesarkan anak-anak mereka—bahkan sebagian dari mereka dipaksa-pisahkan dari anak-anaknya. Perempuan dengan disabilitas harus berjuang melawan beragam stigma dan diskriminasi yang meragukan keibuannya.

Gerakan feminis disabilitas melakukan kritik terhadap sistem representasi dalam kehidupan sosial. Tubuh menurut feminis disabilitas menjadi salah satu bentuk representasi sosial. Representasi tubuh orang dengan disabilitas dianggap menyimpang dari pemaknaan budaya dan sosial mengenai tubuh perempuan. Kondisi tubuh mereka didefinisikan bertentangan dengan norma yang menuntut perempuan memiliki kekuatan fisik sekaligus keindahan. Dalam budaya patriarki, perempuan tanpa disabilitas dianggap menggairahkan pandangan laki-laki, dan perempuan dengan disabilitas merusak keindahan pandangan laki-laki.

Tekanan terhadap tubuh perempuan dengan disabilitas menjadi sangat keras dalam kehidupan sosial. Kontrol atas tubuh perempuan orang dengan disabilitas terus dilakukan agar memenuhi standard normatif yang dikehendaki kebudayaan dominan. Perempuan

dengan disabilitas diperangkap masuk dalam politik medikalisasi yang berpijak pada imajinasi tubuh disabilitas abnormal secara medis.

Jika perempuan tanpa disabilitas harus menjalani sunat agar gairah seksualnya bisa dikendalikan, perempuan dengan disabilitas, selain menghadapi sunat, juga menjadi korban ragam prosedur pembedahan. Tujuannya bukan meningkatkan kualitas hidup, melainkan melakukan standarisasi tubuh dan menghilangkan berbagai perbedaan fisik dengan tubuh orang-orang yang secara kultural diimajinasikan sebagai normal.

Tak cukup dalam definisi tubuh normal. Perempuan dengan disabilitas juga diperangkap dalam politik penampilan. Secara budaya dikembangkan imajinasi mengenai standard kecantikan bagi tubuh perempuan; langsing. Disabilitas dinilai sebagai penyimpangan tubuh perempuan dari standard normal mengenai cantik. Kecantikan menjadi ukuran kualitas tubuh perempuan.

Perempuan dengan disabilitas semakin menjauh dari standard normal tubuh perempuan, sehingga tak hanya menyimpang melainkan melawan secara langsung standard imajinasi tentang kecantikan. Dengan pembacaan seperti ini, bisa terlihat ideologi penampilan menyumbang penindasan sosial terhadap perempuan dengan disabilitas.

Melawan politik penampilan berarti sedang melakukan pendefinisian ulang atas ideologi kecantikan dan abnormalitas, dan meyakinkan keberagaman tubuh apa pun bentuknya bersifat natural dan tindakan keliru melakukan kategori-kategori berdasarkan normal dan abnormal, cantik dan buruk. Menghindari stigma keburukan dan label abnormalitas bukan dengan cara mengikuti politik penampilan, melainkan mengembangkan wacana tanding terhadap norma-norma yang distandarisasi politik penampilan.

Kerangka berpikir kritis seperti ini tampaknya masih perlu dikembangkan dalam peta gerakan pemenuhan hak-hak perempuan dengan disabilitas di Indonesia. Merangkul berbagai kalangan, termasuk feminis tanpa disabilitas penting dilakukan. Sehingga gerakan disabilitas mampu melakukan penghancuran terhadap konsep representasi tubuh, politik medikalisasi, dan politik penampilan, yang kesemuanya bermuara pada tubuh perempuan.

Gerakan menuntut arsitektural agar memenuhi indikator aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas memang penting, tetapi sekadar mengubah kondisi. Gerakan semacam ini tak menyentuh perubahan posisi perempuan dengan disabilitas. Sebab akar diskriminasi itu bukan terletak pada gedung-gedung dan alat transportasi, melainkan pada tubuh perempuan dengan disabilitas.

Mukhotib MD, Konsultan pada Lembaga Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) Yogyakarta

Alamat: Jl. Raya Sandon No. 52 Secang, Magelang, 56195 Jawa Tengah

Telepon: (0293) 714347, 0815 685 0367

Email: naskahmukhotibmd@gmail.com

Blog: www.mukhotibmd.web.id

Rekening:

Bank Mandiri KK A. Yani

Nomor: 136 00 0983289 7

A.n: Mukhotib